

INTISARI

Pembangunan desa wisata memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa. Namun, dalam prakteknya muncul berbagai macam permasalahan seperti konflik antar masyarakat terkait hak pengelolaan wisata, wisata yang dikuasai secara eksklusif, kurangnya partisipasi masyarakat, terjadinya penguasaan wisata secara *elite capture*, kerusakan lingkungan, dan terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola wisata. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka konsep pariwisata berbasis masyarakat/*community based tourism* (CBT) perlu diimplementasikan. Konsep pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada pengelolaan wisata yang dikelola secara langsung oleh masyarakat lokal secara partisipatif. Sehingga, masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial. Desa Pambotanjara merupakan salah satu desa dari 14 desa wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Di Desa Pambotanjara terdapat wisata Bukit Laiuhuk Wairinding yang menawarkan keindahan alam berupa padang dan bukit savana. Sejak awal terkenalnya wisata ini pada tahun 2014 terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan & pengembangan yang mencakup belum dioptimalkannya potensi dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, hal ini yang menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti secara lebih mendalam terkait bagaimana pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di wisata Bukit Laiuhuk Wairinding.

Penelitian ini dilakukan di Wisata Bukit Laiuhuk Wairinding, Desa Pambotanjara, Kabupaten Sumba Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai mencakup Kepala Desa Pambotanjara, Bumdes Pambotanjara sebagai pengelola wisata Bukit Laiuhuk Wairinding, Pokdarwis Bukit Wairinding, masyarakat Desa Pambotanjara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur, dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wisata Bukit Laiuhuk belum sepenuhnya menjalankan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari tiga fase pengelolaan dan pengembangan wisata. Fase pertama dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan pengelolaan wisata tidak menerapkan pariwisata berbasis masyarakat karena dijalankan secara eksklusif oleh beberapa oknum masyarakat Desa Pambotanjara. Pada praktiknya, uang hasil keuntungan pariwisata hanya dinikmati oleh segelintir oknum. Selanjutnya, fase kedua pada tahun 2019 dibentuk Pokdarwis Bukit Wairinding. Berlanjut pada tahun 2021, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan bantuan dana sebesar Rp700.000.000 untuk pengembangan infrastruktur wisata. Pada fase ini sudah terdapat upaya untuk menjadikan pengelolaan wisata bersifat CBT. Terakhir, fase ketiga tahun 2022 hingga tahun 2024 pengelolaan wisata Bukit Laiuhuk Wairinding dikelola oleh Bumdes Pambotanjara. Pada fase ini pengelolaan CBT belum berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah, terjadinya penguasaan wisata secara *elite capture*, dan masih minimnya kerjasama antar Bumdes Pambotanjara serta Pokdarwis Bukit Wairinding dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Pada sisi lainnya, komponen 4A (*attraction, accessibility, amenities & ancillary services*) belum maksimal dijalankan dengan baik sehingga belum terlalu besar keuntungan wisata yang didapatkan.

Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, *Elite Capture*, Komponen 4A Pariwisata (*attraction, accessibility, amenities & ancillary services*)

ABSTRACT

The development of tourism villages aims to provide social and economic benefits to local communities. However, various issues have arisen in practice, such as conflicts over tourism management rights, exclusive control of tourism, limited community participation, elite capture of tourism benefits, environmental damage, and limited human resources for tourism management. To address these challenges, the concept of community-based tourism (CBT) needs to be implemented. Community-based tourism emphasizes the direct and participatory management of tourism by local communities, ensuring that they receive both economic and social benefits. Pambotanjara Village is one of 14 tourist villages in East Sumba Regency. It features Bukit Laiuhuk Wairinding, known for its natural beauty of grasslands and savannah hills. Since gaining popularity in 2014, this tourist site has faced various management and development issues, including underutilization of potential and human resources. Therefore, researchers are interested in studying in-depth how community-based tourism management and development can be implemented at Bukit Laiuhuk Wairinding to address these challenges.

This research is conducted at Bukit Laiuhuk Wairinding, Pambotanjara Village, East Sumba Regency. The research method used is qualitative descriptive. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. Key informants interviewed include the Head of Pambotanjara Village, the Village-Owned Enterprises (Bumdes) of Pambotanjara as the manager of Bukit Laiuhuk Wairinding tourism, the local tourism group (Pokdarwis) of Bukit Wairinding, residents of Pambotanjara Village, the Head of the Tourism Office of East Sumba Regency, and the Head of the Poverty Alleviation Division of the Social Welfare Office of East Sumba Regency.

Research results indicate that the management and development of tourism in Bukit Laiuhuk have not fully implemented the concept of community-based tourism (CBT). This can be observed across three phases of tourism management and development. In the first phase from 2016 to 2019, tourism management did not adopt community-based tourism as it was exclusively controlled by a few individuals from Pambotanjara Village. In practice, the profits from tourism were enjoyed only by a select few. Moving to the second phase in 2019, Pokdarwis Bukit Wairinding was formed. By 2021, the Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia provided Rp700,000,000 in funding for tourism infrastructure development. During this phase, efforts were made to transition towards community-based tourism (CBT). Lastly, in the third phase from 2022 to 2024, tourism management at Bukit Laiuhuk Wairinding was handled by Bumdes Pambotanjara. However, CBT management has not yet fully realized its potential, evidenced by low community participation, occurrences of elite capture in tourism control, and minimal cooperation between Bumdes Pambotanjara and Pokdarwis Bukit Wairinding in tourism management and development. Furthermore, the 4A components (attraction, accessibility, amenities & ancillary services) have not been effectively maximized, leading to relatively modest tourism profits.

Keywords: Community Based Tourism, Community Participation, Elite Capture, 4A Tourism Components (attraction, accessibility, amenities & ancillary services).

